



blpj
GRESIK



PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK**



Sanusi Burhanudin, ST, M.MT

Pendidikan Terakhir

- Pasca Sarjana, MMT ITS Surabaya

Sertifikat

- Sertifikat Keahlian PBJP Kategori L4
- Sertifikat Kepemimpinan dan Manajerial PBJ LKPP-MCAI
- Sertifikat Keahlian PBJ LKPP-MCAI
- Sertifikat Fasilitator PBJP LKPP
- Sertifikat Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Muda
- Sertifikat Kompetensi Kelompok Kerja Pemilihan oleh BNSP

CV

Jabatan/Organisasi

- Kasubbag Pelayanan Pengadaan BLPBJ Gresik
- Mentor Pusat Keunggulan Pengadaan LKPP
- Pengurus IAPI DPD Jatim Periode 2019-2022 (seksi pelatihan dan sertifikasi)

CV

Pengalaman (sejak 2005)

- Pengelola PBJ
- Mentor CoE LKPP-MCAI
- Champion ULP Percontohan LKPP-MCAI
- Terlibat dalam penyusunan materi Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
- Terlibat dalam penyusunan materi kompetensi PBJP
- Terlibat dalam penyusunan buku tugas On The Job Training (OJT) berdasarkan KKT dan SKJ PBJP

CV

POKOK BAHASAN

1. PERATURAN PBJP
2. PENGERTIAN, GARIS BESAR, JENIS PENGADAAN
3. PELAKU PENGADAAN
4. PBJ ELEKTRONIK
5. TAHAP PROSES PENGADAAN
 - A. PERENCANAAN PENGADAAN
 - B. PERSIAPAN PENGADAAN
 - C. PERSIAPAN PEMILIHAN
 - D. PELAKSANAAN PEMILIHAN
 - E. PELAKSANAAN KONTRAK
 - F. SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN



KPK, LKPP, dan Pemda Bahas Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan rapat koordinasi terkait pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Rapat tersebut dilakukan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan 10 daerah dari level provinsi dan kota.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, rapat maraknya korupsi di daerah dan tingginya alokasi k untuk membiayai pengadaan barang dan jasa, yang pengadaan belum dapat dimanfaatkan masyarakat

Dalam rapat ini, KPK memilih 10 daerah yang pernah pengadaan b

"Hal ini bertu yang merugikan (5/3/2018).

"Selain itu, ada pula tentang ko agar tidak dilakukan pemecaha membuat prosesnya lebih efis terjaga," ujar Febri.

Selama 2015-2017, lanjut Febri, ada 6.682 paket yang gagal lelang. Sebanyak 41 persen berupa konstruksi, 23-32 persen pengadaan barang, dan 14-25 persen jasa konsultasi (badan usaha).

Penyebab kegagalan, di antaranya penawaran tidak memenuhi syarat administrasi, peserta tidak lulus evaluasi teknis, dan tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran.

"Tantangan yang dihadapi antara lain adalah masih ada praktik korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, industri dan produk dalam negeri belum menguasai pasar, UMKM belum banyak berperan," ujar Febri.

Rapat tertutup itu dihadiri Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Kepala LKPP Agus Prabowo, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Sarah Sadiqa, Direktur Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP Sutan S Lubis, Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sekda Kota Semarang.

1. Peraturan PBJP

STRUKTUR PERPRES NO 16/2018

15 BAB
94 PASAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA
PENGADAAN BARANG/JASA

BAB III
PELAKU PENGADAAN
BARANG/JASA

BAB IV
PERENCANAAN
PENGADAAN

BAB V
PERSIAPAN PENGADAAN
BARANG/JASA

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

BAB VII
PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

BAB VIII
PENGADAAN KHUSUS

- PENGADAAN BARANG/
JASA DALAM RANGKA
PENANGANAN KEADAAN
DARURAT

- PENGADAAN
BARANG/JASA DI
LUAR NEGERI

- PENGECUALIAN

- PENELITIAN

- TENDER/SELEKSI
INTERNASIONAL DAN
DANA PLN/HLN

BAB IX
USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI,
DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

- PERAN SERTA
USAHA KECIL

- PENGGUNAAN
PRODUK DALAM
NEGERI

- PENGADAAN
BERKELANJUTAN

BAB X
PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK

BAB XI
SUMBER DAYA MANUSIA
DAN KELEMBAGAAN

BAB XII
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI,
DAN PELAYANAN HUKUM

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-
LAIN

BAB XIV
KETENTUAN
PERALIHAN

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

1. Peraturan PBJP

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 dalam Proses Pengadaan

2



Perlem 7/2018 :
Perencanaan Pengadaan

Perlem 8/2018 : Pedoman Swakelola

PERLEM 9/2018 : PEDOMAN PBJ MELALUI PENYEDIA

Perlem 10/2018 : Tender/Seleksi Internasional

Perlem 12/2018 : PBJ Pengecualian

Perlem 13/2018 : PBJ Penanganan Keadaan Darurat

Perlem 11/2018 : Katalog Elektronik
Perlem 14/2018 : UKPBJ
Perlem 15/2018 : Pelaku Pengadaan
Perlem 16/2018 : Agen Pengadaan

Perlem 17/2018 : Daftar Hitam
Perlem 18/2018 : Layanan
Penyelesaian Sengketa

1. Peraturan PBJP

JUDUL PERATURAN MENTERI

Permen PU Nomor 7 Tahun 2011

tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Konsultansi

*(revisi terakhir: Permen PUPR
No.31 Tahun 2015)*

Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019

tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Jasa Konstruksi
melalui Penyedia

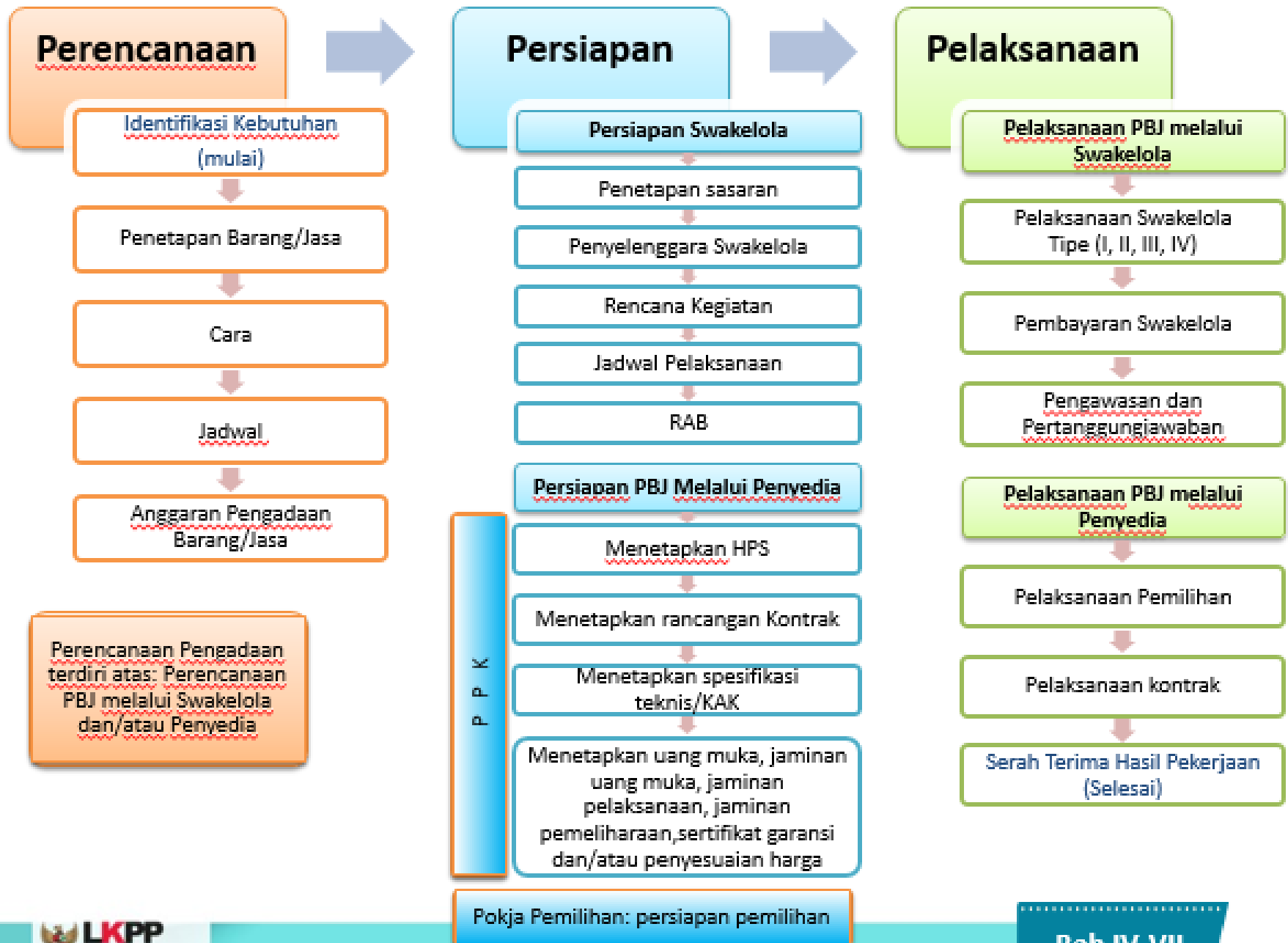
PERBEDAAN:

1. "Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi", **diubah menjadi "Jasa Konstruksi"**. Hal ini sesuai dengan definisi "Jasa Konstruksi" dalam UU No.2 Tahun 2017 bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2. Ditambahkan kata "**melalui Penyedia**", karena permen hanya mengatur tatacara pengadaan jasa konstruksi melalui tender/seleksi, yang nantinya akan dilaksanakan oleh penyedia jasa, tidak mengatur yang dilaksanakan secara swakelola.

Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

“Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”

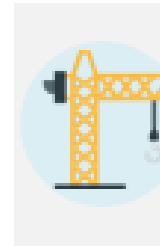
Garis Besar PBJP



Jenis Pengadaan pada PBJP



Barang



Pekerjaan
Konstruksi



Jasa Konsultansi



Jasa Lainnya

PBJ DAPAT DILAKUKAN SECARA TERINTEGRASI

3. PELAKU PENGADAAN



PENGGUNA ANGGARAN



KUASA
PENGGUNA ANGGARAN



PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN



PEJABAT
PENGADAAN



KELOMPOK KERJA
PEMILIHAN



PANITIA/PEJABAT
PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN



PENYEDIA



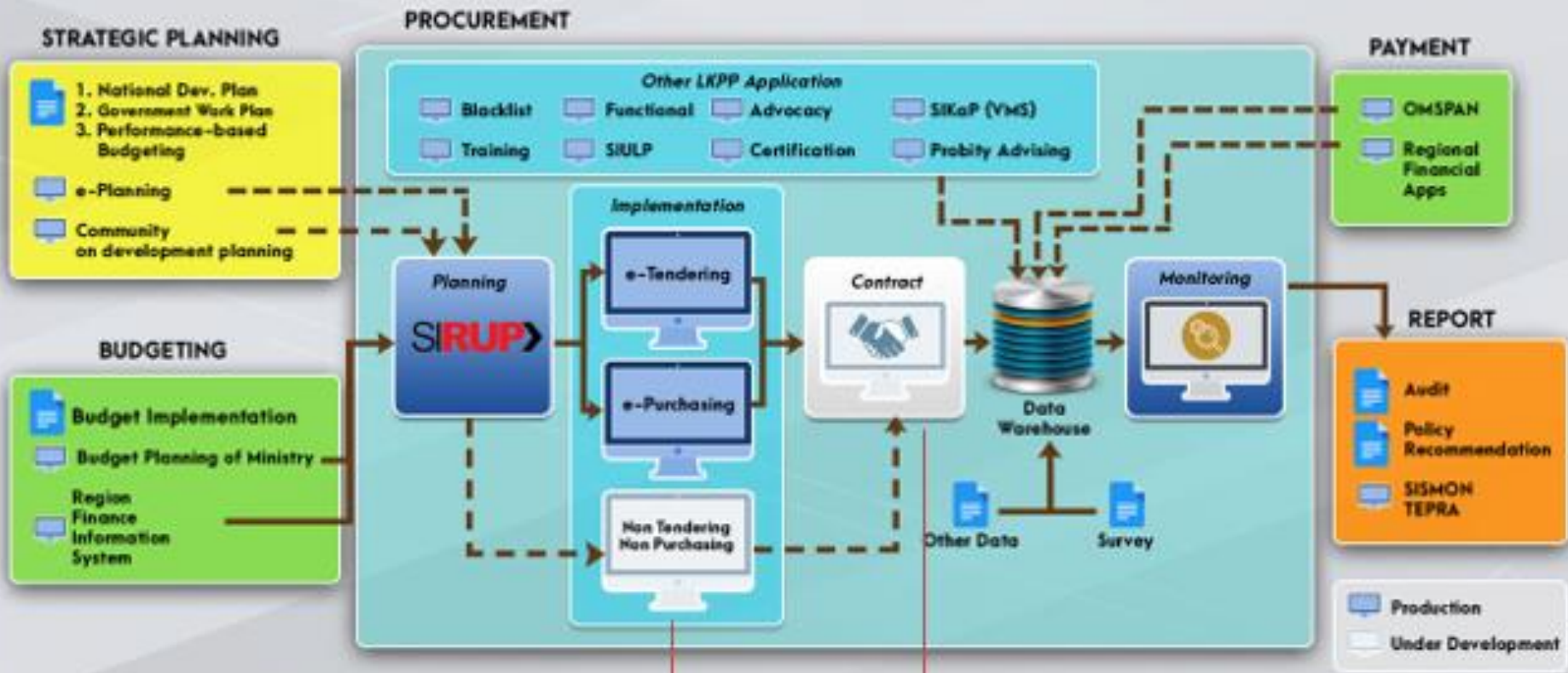
PENYELENGGARA
SWAKELOLA



AGEN PENGADAAN

4. PBJ ELEKTRONIK

BUDGETING-PROCUREMENT-PAYMENT INTEGRATED SYSTEMS



Dalam pengembangan

4. PBJ ELEKTRONIK

- ❑ Penyelenggaraan PBJ dilakukan secara elektronik menggunakan SI yang terdiri atas SPSE dan sistem pendukung
- ❑ Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia dilakukan melalui aplikasi SPSE dan sistem pendukung

Pasal 69 ayat 1, Per LKPP 9/18 Pasal 3

MAKA
termasuk Pengadaan
Langsung dilakukan
melalui SPSE

TA 2019 Keseluruhan
proses PBJ dilakukan
elektronik dengan SPSE
4.3

Masukan username dan Password

No	Nama Paket	HPS	Akhir Pendaftaran
Pengadaan Barang			
1	Pekerjaan Pembuatan Unsur Peta Rupabumi Indonesia Skala Menengah Wilayah Kalimantan Paket 11	Rp 5,5 Jt	14 April 2015 15:22
2	Pengadaan Mobil Alat Berat 1 Buah	Rp 490 Jt	09 Juli 2020 23:59
3	ATK dan Bahan Komputer (Prajab II)	Rp	15 Maret 2015 23:59

Pengumuman dan Berita	
06 Maret 2015 22:19	Belajar bareng
06 Maret 2015 22:19	Belajar bareng
14 Februari 2015 05:12	Cara import File CSV ke Excel 2007
20 Januari 2015 10:10	

4. PBJ ELEKTRONIK

E-PURCHASING

KOMODITAS NASIONAL

KOMODITAS LOKAL

KOMODITAS SEKTORAL

KOMODITAS NASIONAL 132365 Items Selengkapnya >

Alat Berat (51)	Alat Kebersihan (7)	Alat Kesehatan (15569)
Alat Laboratorium (6)	Alat Pemindai (0)	Alat dan Mesin Perikanan (29)
Alat dan Mesin Pertanian (754)	Bahan Kimia (3498)	Benih (140)
Bibit Sapi Impor dan Bibit Kerbau Impor (0)	Buku Pelajaran Sekolah (0)	Dekorasi Bunga (16)
Hot-Mix (276)	Internet Service Provider 2018 (8611)	Irigasi tetes (1)
Jasa Operator Bus (6)	Jasa Pengelolaan Gedung (14)	Jasa Pengiriman (0)
Jasa Perikanan (0)	Kapal Perikanan (0)	Kartu (12)
Kendaraan Bermotor (7332)	Kendaraan Bermotor Off The Road (130)	Komunikasi & Informatika (97)
Layanan Keuangan Digital (9)	Logistik Pemilu (7)	Material Konstruksi (1)
Meubelair Sekolah (8)	Obat / Hormon Tanaman dan Hewan (18)	Obat 2017 (0)
Obat 2018 (1091)	Obat Kontrasepsi BKKBN 2016 (1)	Online Shop - Perangkat Komputer (80869)
Online Shop - Perkakas (12473)	PE Sheet (19)	PP Sheet (9)
Pakan (3)	Pekerjaan Jalan (482)	Penerangan Jalan Umum (120)
Peralatan Kantor (338)	Peralatan Lalu Lintas (2)	Peralatan Olahraga (8)
Peralatan Pendidikan (252)	Peralatan SAR (0)	Peralatan dan Bahan Pemadam Kebakaran (5)
Ready-Mix (0)	Recycling Road (19)	Segel dan/atau Hologram Dengan Security Print

Komoditas

The screenshot shows a web interface for a catalog of agricultural machinery. The header includes 'Catalogue', 'Informasi', and 'Catalog'. The main content area is titled 'Katalog Produk Alat dan Mesin Pertanian'. It lists several tractor models with their respective prices, specifications, and update dates. Each product entry includes a small image of the tractor, a 'Bandingkan' (Compare) button, and a 'Bel' (Buy) button. The products listed are:

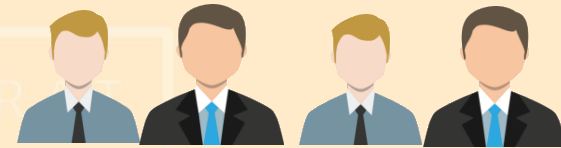
- DONGFENG-GATRA Tractor 36 HP Type GT 368**: Price IDR 175,000,000.00, updated 31 August 2016.
- QUICK A 360**: Price IDR 199,500,000.00, updated 28 September 2016.
- ISEKI NT540F**: Price IDR 202,000,000.00, updated 11 February 2016.
- MAXXI Tractor 40HP Maxxi WD404**: Price IDR 205,000,000.00, updated 27 January 2016.
- JOHN DEERE Traktor Roda Empat JD 3036E, 4WD**: Price IDR 217,000,000.00, updated 09 May 2016.

Kategori & Produk

5. Tahap Proses Pengadaan



Tahap Proses Pengadaan



**PERENCANAAN
PENGADAAN-BAB IV
(PA/KPA-PPK)
PASAL 18 - 22**

**PERSIAPAN PENGADAAN-BAB V (23-46)
PENGADAAN-PPK PEMILIHAN - UKPBJ**

**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA PPK>>PA/KPA (58)
PEMERINTAH –BAB VI, VII – (47 – 57)
PEMILIHAN – POKJA
PEMILIHAN/PP-TIM SKL
KONTRAK-PPK-TIM SKL
SERAHTERIMA
PENYEDIA>>PPK**

- ❖ Perencanaan Pengadaan Identifikasi Kebutuhan, Penetapan, Cara, Jadwal, Anggaran (18)
- ❖ Spesifikasi Teknis/KAK (19)
- ❖ Pemaketan (20)
- ❖ Konsolidasi (21)
- ❖ RUP (22)

- ❖ Swakelola (23-25)
- ❖ HPS (26)
- ❖ Rancangan Kontrak (27-28)
- ❖ Spekteknis/KAK
- ❖ Uang muka, jaminan, sertifikat garansi, penyesuaian harga (29-37)

- ❖ Metode Pemilihan Penyedia (38,41)
- ❖ Metode evaluasi Penyedia (39,42)
- ❖ Metode Penyampaian dokumen Penyedia (40,43)
- ❖ Kualifikasi (44)
- ❖ Jadwal (45)
- ❖ Dok pemilihan (46)

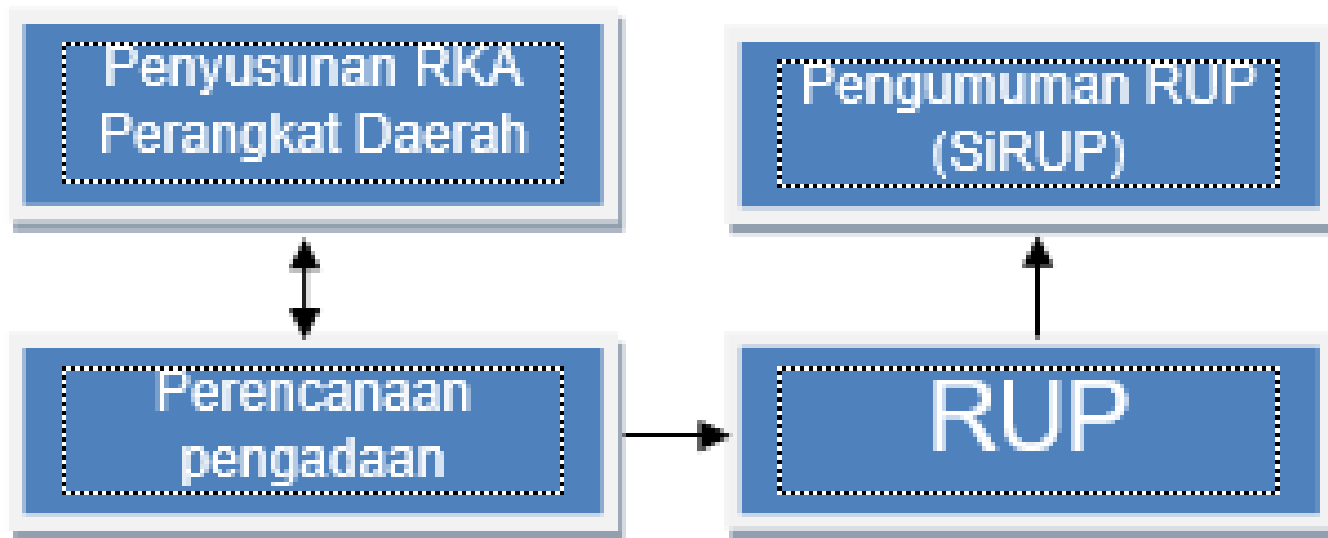
- ❖ Pelaksanaan Skl (47)
- ❖ Pengawasan & perwab skl (49)
- ❖ Pelaksanaan Pemilihan (50)
- ❖ Tender/Seleksi Gagal (51)

- ❖ Pelaksanaan Skl (47)
- ❖ Pembayaran Skl (48)
- ❖ Pengawasan dan perwab skl (49)
- ❖ Pelaksanaan Kontrak (52)
- ❖ Pembayaran prestasi (53)
- ❖ Perubahan kontrak (55)
- ❖ Penyelesaian kontrak (56)

- ❖ Serah terima Penyedia ke PPK (57)

- ❖ Serah terima PPK ke PA/KPA (58)
- ❖ Cek PPHP, PjP HP

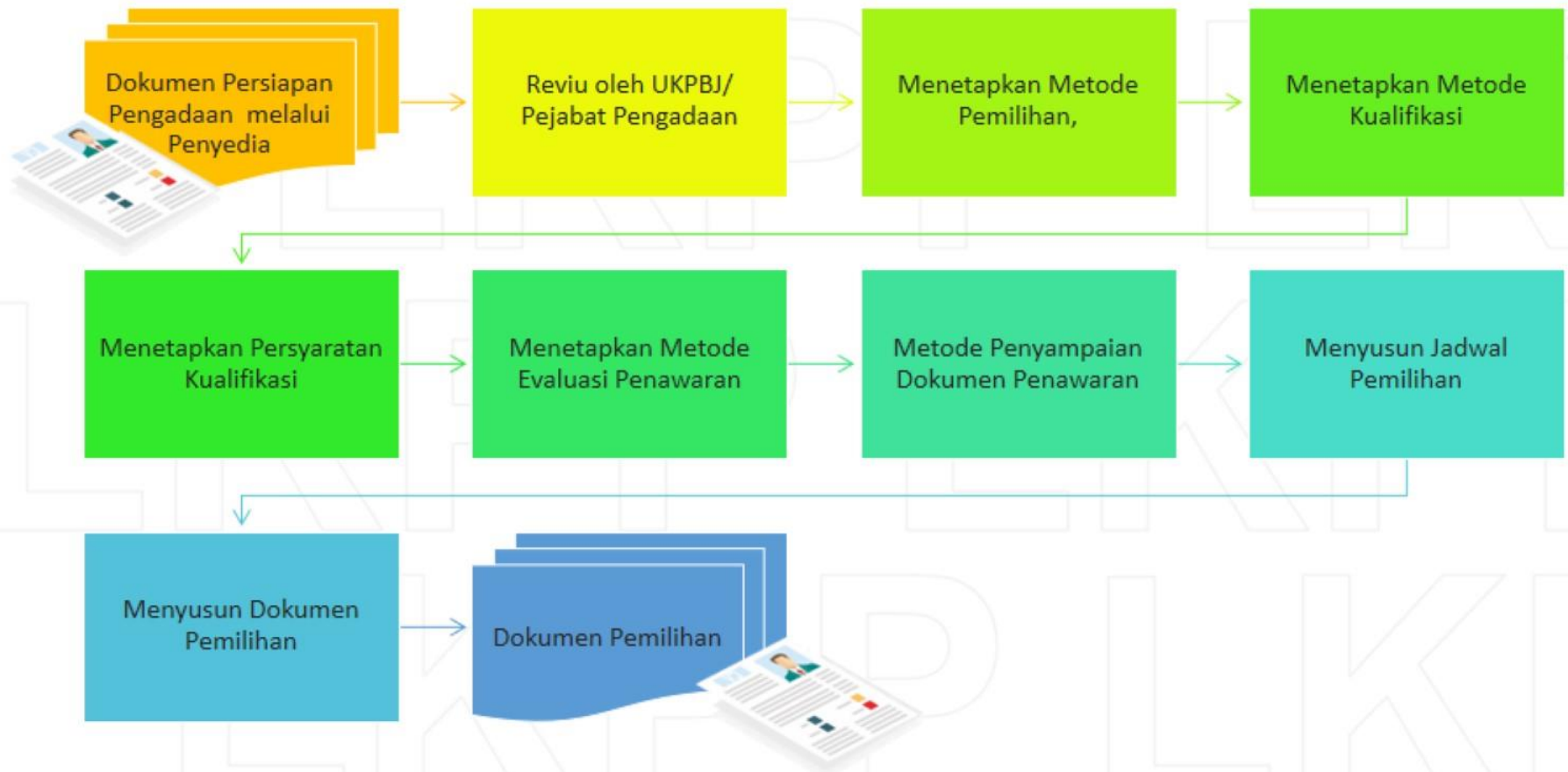
A. PERENCANAAN PENGADAAN



B. PERSIAPAN PENGADAAN



C. PERSIAPAN PEMILIHAN



D. PELAKSANAAN PEMILIHAN



Pelaksanaan Pemilihan



- Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan
- Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah yang dilakukan setelah RUP diumumkan melalui SIRUP

Pemilihan tidak dapat dilaksanakan sebelum RUP diumumkan

E. PELAKSANAAN KONTRAK

Secara ringkas, pelaksanaan Kontrak meliputi:



- a. Penetapan SPPBJ
- b. Penandatanganan Kontrak
- c. Penyerahan Lokasi Kerja
- d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP)
- e. Pemberian Uang Muka
- f. Penyusunan Program Mutu
- g. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- h. Mobilisasi
- i. Pemeriksaan Bersama
- j. Pengendalian Kontrak
- k. Inspeksi Pabrikasi
- l. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
- m. Perubahan Kontrak
- n. Penyesuaian Harga
- o. Keadaan Kahar
- p. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak
- q. Pemutusan Kontrak
- r. Pemberian Kesempatan
- s. Denda dan Ganti Rugi

Ikatan Perjanjian



PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Bentuk Kontrak

Bentuk kontrak	Barang	Konstruksi	Jasa lainnya	Konsultansi
 Bukti pembelian/ pembayaran	≤ 10 juta	n/a	≤ 10 juta	n/a
 Kuitansi	≤ 50 juta	n/a	≤ 50 juta	n/a
 Surat Perintah Kerja (SPK)	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 200 juta	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 100 juta
 Surat perjanjian	> 200 juta	> 200 juta	> 200 juta	> 100 juta
 Surat pesanan	<i>e-purchasing</i> /pembelian melalui toko daring			

RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA

PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah BAHP diterima oleh PPK dari Pokja

Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, dilaksanakan untuk memastikan pemenang memenuhi ketentuan:

- Keberlakuan data isian kualifikasi;
- Bukti sertifikat kompetensi personel manajerial;
- Kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikasi pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
- Pelaksanaan alih pengalaman/ keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/ magang, paling sedikit pembahasan terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan dan jenis keahlian.

Tambahan: perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;

Peserta yang tidak dapat membuktikan Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang diusulkan dalam dokumen penawaran saat rapat persiapan penunjukan penyedia dikenakan sanksi sebagai berikut: sanksi administratif, berupa pembatalan penetapan pemenang dan sanksi daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

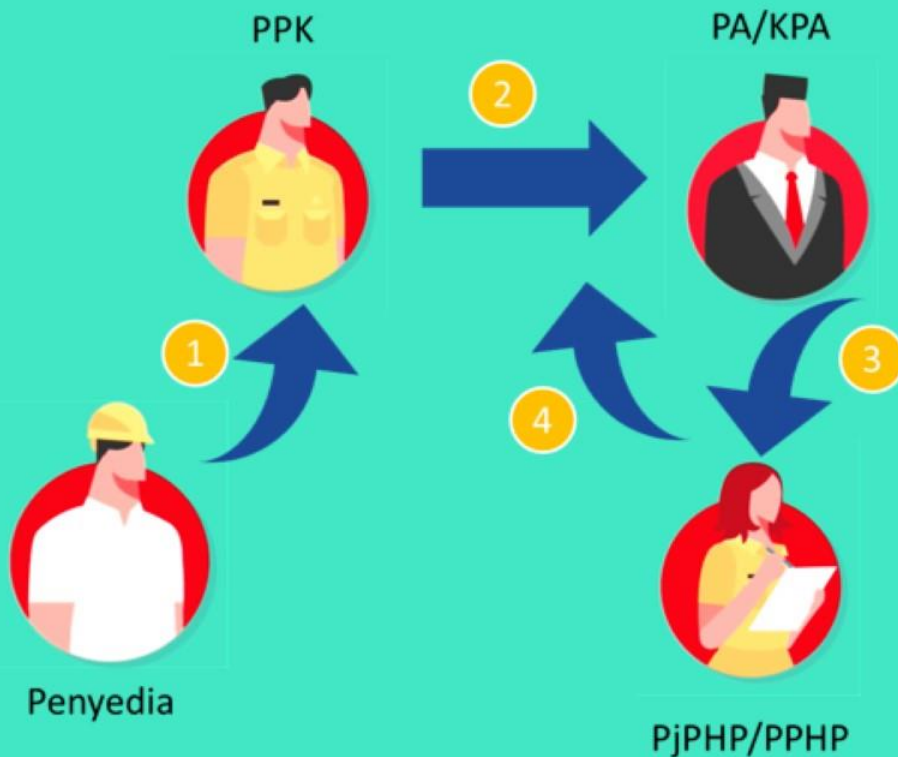
RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK (RPPK)

- ❑ PPK dan Penyedia wajib melaksanakan RPPK setelah diterbitkan SPPBJ.
- ❑ Dalam RPPK, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dokumen Kontrak dan kelengkapan;
 - b. Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
 - c. Rencana penandatanganan Kontrak;
 - d. Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (bila ada);
 - e. Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
 - f. Jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
 - g. Asuransi;
 - h. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau
 - i. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.

RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK (RPPK2)

- ❑ Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan RPPK2.
- ❑ Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam RPPK2 meliputi:
 - a. RMPK;
 - b. pelaksanaan RKK;
 - c. organisasi kerja;
 - d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi;
 - g. penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama; dan
 - h. hal-hal lain yang dianggap perlu.

F. SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN



1. Setelah pekerjaan selesai 100% Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
2. PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA.
3. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.
4. PjPHP/PPHP melakukan **pemeriksaan administratif.**

Setelah penandatanganan BAST Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA, PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan

TERIMA KASIH



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

